

ABSTRAK

Tingginya laju pertumbuhan populasi di Indonesia menyebabkan peningkatan jumlah penduduk yang semakin tinggi. Pertambahan jumlah penduduk tersebut menyebabkan munculnya masalah terkait populasi, kesejahteraan keluarga, dan isu kesehatan seperti tingginya angka stunting. Oleh karena itu, Presiden Indonesia telah menetapkan Program Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) sebagai upaya untuk mengatasi tantangan tersebut. Keberhasilan Program Kampung KB sangat bergantung pada peran penting pemerintah, terutama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Lhokseumawe. Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran pemerintah tersebut serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung atau menghambat pelaksanaan perannya dalam Program Kampung KB. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi non partisipasi, wawancara mendalam dan studi dokumen. Adapun analisis data yang digunakan yaitu dimulai dari tahap mengorganisasikan data, memilah data serta mencari dan menemukan pola data penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menjalankan Program Kampung KB, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Lhokseumawe memiliki peran penting dalam penyuluhan dan pembinaan. Penyuluhan dilakukan oleh tim Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) melalui program Dapur Sehat Atasi *Stunting*. Sementara itu, pembinaan dilakukan melalui berbagai program kelompok kegiatan seperti Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Lansia (BKL), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R), dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA). Keberhasilan implementasi Program Kampung KB didukung oleh faktor struktural seperti ketersediaan sarana dan prasarana serta partisipasi tinggi dari perangkat gampong. Secara kultural, faktor pendukungnya meliputi diadakannya musyawarah sebelum penyuluhan dan sikap masyarakat yang terbuka terhadap program ini. Namun, terdapat kendala dalam implementasinya, yaitu secara struktural tidak adanya perekrutan PKB/PLKB selama periode 2017-2024 dan keterbatasan anggaran. Secara kultural, kendalanya meliputi masih ada masyarakat yang enggan ber-KB dan adanya stigma sosial bahwa KB adalah tanggung jawab perempuan.

Kata Kunci: Implementasi, Kampung KB, Kesejahteraan Keluarga, Pemerintah,